KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 0 0 0			н.4 Х	H.4 X Final	
		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5	Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 68 807 572 0 722 000							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : SODOTO							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG JUMLAH PENGHASILAN TARIF LEBIH						I	
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJ	EK PAJAK	BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.:	2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
3 21-40	2-01	10.810.000	10.810.000	0	5	540.500	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 01086/LS-TJ/RSJD.AHM/2022							
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 0 8 dd 0 3 mm 2 0 2 2 уууу							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor : Tanggal dd mm yyyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerinta		9 5 3 3 5	0 1 6 2 7 2 2	0 0 0			
C.2 Nama Instansi Pemerinta	h :		RAH ATMA HUSADA MAHAK		ALIMANTAN	I TIMUR	
C.3 ID Subunit Organisasi	C.3 ID Subunit Organisasi :						
C.4 Tanggal	:	0 8 dd 0 3 mm	2 0 2 2 yyyy			_	
C.5 Nama Penandatangan	:	RIANDY					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan b tandatangani secara elektronik	ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah sa	aya isi dengan	ı benar dan telah saya	
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diper	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	r mengatur bahwa di	okumen ini tel	ah ditandatangani secara	

33IPOMEG